

Kajian: Revisi UU TNI di Hotel Mewah Ditengah Efisiensi Anggaran

Tanggal: 18 Maret 2025

Lokasi: -

Pengkaji: Divisi Kastrat Himapersa

Pendahuluan

Komisi I DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat Panitia Kerja pada 14-15 Maret 2025 untuk membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rapat yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran.

Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa rapat tersebut bersifat mendesak dan membutuhkan fasilitas yang mendukung diskusi maraton. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan rapat di luar gedung DPR sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 254. Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerahkan penilaian terkait lokasi rapat kepada kesekjenan DPR dan memastikan prosedur telah diikuti.

Poin-Poin Penting dalam Revisi UU TNI

Revisi UU TNI ini mencakup beberapa perubahan signifikan, antara lain:

1. **Penambahan Tugas TNI:** Tugas operasi militer selain perang yang semula berjumlah 14 ditambah menjadi 17, termasuk penanganan masalah narkoba dan siber.
2. **Perluasan Jabatan Sipil untuk TNI Aktif:** Lembaga negara yang dapat diisi oleh perwira TNI aktif diperluas dari 10 menjadi 16.
3. **Menambah batas usia pensiun:** Revisi UU TNI yang diusulkan mencakup perubahan batas usia pensiun prajurit. Dalam Pasal 43 UU TNI sebelumnya, usia pensiun perwira ditetapkan 58 tahun, sementara bintang dan tamtama 53 tahun. Dalam revisi yang direncanakan, batas usia pensiun bintang dan tamtama akan dinaikkan menjadi 55 tahun. Sedangkan, usia pensiun perwira akan disesuaikan menjadi 58 hingga 62 tahun, tergantung pangkat atau kebijakan presiden, khususnya bagi perwira bintang empat.

Kekhawatiran terhadap Kembalinya Dwifungsi TNI

Revisi UU TNI mendapat kritik dari masyarakat sipil yang khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru, di mana militer berperan dalam urusan sipil dan politik. Mereka juga menilai perubahan ini bisa mengganggu sistem meritokrasi birokrasi serta melemahkan profesionalisme TNI.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, menyebut revisi ini sebagai "abusive law making" dan harus dibatalkan karena berisiko mengancam demokrasi dan HAM. Koalisi Masyarakat Sipil menekankan pentingnya transparansi serta partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang terkait militer.



Apa dampak pada sistem kejaksaan agung?

Ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur peran dan kewenangan Kejaksaan Agung dalam kaitannya dengan TNI berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum, baik di lingkungan militer maupun di luar ranah militer. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada transparansi, akuntabilitas, serta independensi proses hukum yang melibatkan prajurit TNI. Selain itu, perlu diingat bahwa TNI adalah institusi yang dipersenjatai, sehingga tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat meningkat.

Aspek Transparansi dan Partisipasi Publik

Rapat tertutup tanpa akses publik dan media dalam pembahasan RUU TNI memicu kekhawatiran terkait kurangnya transparansi. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai aspirasi publik.

Sekjen DPR, Indra Iskandar, menyatakan bahwa rapat di luar gedung DPR diperbolehkan dalam kondisi mendesak sesuai Tata Tertib Pasal 254, tetapi tidak ada penjelasan konkret mengenai urgensi rapat tertutup di hotel mewah.

Selain itu, keberadaan kendaraan taktis (rantis) Koopssus TNI di sekitar lokasi rapat memunculkan perdebatan. Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menjelaskan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk pengamanan, namun penggunaan alutsista dalam konteks sipil dinilai menimbulkan kesan represif.

Kesimpulan

Revisi UU TNI yang dibahas di Hotel Fairmont mendapat kritik karena dinilai tidak efisien dan kurang transparan. Perubahan utama mencakup penambahan tugas TNI, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, dan peningkatan batas usia pensiun. Masyarakat sipil khawatir revisi ini menghidupkan kembali dwifungsi TNI, melemahkan meritokrasi birokrasi, serta menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum akibat ketidakjelasan peran Kejaksaan Agung. Rapat tertutup tanpa akses publik serta

keberadaan kendaraan taktis TNI semakin memicu kontroversi. Banyak pihak menuntut transparansi dan partisipasi publik untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

Referensi

- <https://www.poskota.co.id/2025/03/16/rapat-ruu-tni-di-hotel-mewah-warga-sipil-hallo-efisiensi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/17302691/ketua-dpr-angkat-bicara-soal-rapat-revisi-uu-tni-di-hotel-mewah-padaahal-lagi>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316060028-20-1209317/sekjen-dpr-soal-rapat-ruu-tni-di-hotel-urgensi-ada-government-rate>
- <https://news.detik.com/berita/d-7827559/puan-jawab-sorotan-komisi-i-dpr-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont>
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/16/09100621/revisi-uu-tni-kewenangan-ditambah-urusan-narkoba-siber-lembaga-yang-dijabat>
- <https://www.tempo.co/politik/ramai-revisi-uu-tni-pasal-pasal-dalam-uu-tni-yang-akan-direvisi-1220486>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250317101115-12-1209600/mengapa-harus-khawatir-dengan-revisi-uu-tni-dan-dwifungsi-militer>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-htn-unpad--terindikasi-abusive-law-making--revisi-uu-tni-harus-dibatalkan-lt67d79e45999d8>
- <https://tni.mil.id/view-253587-revisi-uu-tni-untuk-perkuat-pertahanan-negara-dan-profesionalisme-prajurit.html>
- <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-dpr-rapat-di-hotel-mewah-apa-kabar-efisiensi-anggaran>